

**PENERIMAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)
PADA KOMUNITAS ADAT TERPECIL(KAT) DI DESA SARIPI
KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO**

Rauf Hatu

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak: Program Keluarga Berencana merupakan suatu program pemerintah yang pada intinya ditujukan untuk menjarangkan tingkat kelahiran dan kehamilan serta menciptakan kesehatan antara ibu dan anak terutama bagi masyarakat yang memiliki usia produktif. Adapun faktor yang mendorong penerimaan Program Keluarga Berencana pada Komunitas Adat Terpecil yaitu: (1) tingkat pendidikan Pasangan Usia Subur (PUS), (2) pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap program Keluarga Berencana (KB), (3) tingkat pendapatan Pasangan Usia Subur (PUS), (4) usia perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS), (5) pandangan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang jumlah anak yang dimiliki, (6) pandangan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang pembatasan jumlah anak dari segi adat dan tradisi setempat, (7) pandangan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang pembatasan jumlah anak dari segi agama yang dianut, (8) usia isteri pada saat perkawinan dan sistem pelayanan petugas Keluarga Berencana setempat.

Kata kunci : Keluarga Berencana dan Komunitas Adat Terpecil

Awal tahun 2003 telah bergulir usulan untuk melakukan amandemen Undang-undang No.10 tahun 1992 mengenai perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Baik dari sisi akademis maupun praktis, hal ini menarik untuk dicermati, terutama untuk mengkaji secara objektif perlu tidaknya amandemen tersebut dilakukan.

Secara internal, keberadaan Undang-Undang No.10 Tahun 1992 telah memberikan landasan hukum bagi kebijakan kependudukan di Indonesia selama ini. Persoalannya adalah terdapat perubahan isu kependudukan secara signifikan, baik yang terkait dengan kondisi dalam negeri maupun perubahan global, yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan kependudukan di masa yang akan datang. Pada tingkat tertentu, peninjauan terhadap Undang-Undang yang telah ada merupakan bagian yang tidak terelakkan sebab ada bukti yang sangat jelas bahwa isi Undang-Undang yang ada masih belum sepenuhnya merespon isu yang telah menjadi komitmen

bersama antarnegara. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua *stakeholders* memahami bahwa telah terjadi perubahan isu kependudukan yang cukup mendasar, bahkan pada tingkat tertentu perubahan tersebut diabaikan. Oleh karena itu, tampaknya masih cukup relevan untuk mendiskusikan isu kependudukan di Indonesia, khususnya pada Orde Baru ketika Indonesia mengalami pergolakan sosial, politik, dan ekonomi.

Masalah kependudukan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa komponen masing-masing: *Pertama*, pada periode telah terjadi perubahan yang sangat substansial terhadap kondisi sosial ekonomi dan politik di Indonesia yang langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kondisi kependudukan di berbagai aspek. Pada tingkat tertentu, khususnya terkait dengan desentralisasi keberhasilan kebijakan kependudukan yang telah dicapai selama ini terancam. Sementara ada tuntutan yang sangat kuat agar semua dampak dari perubahan tersebut memperoleh respon secara memadai, khususnya di tingkat kebijakan. Hal ini dalam rangka agar permasalahan kependudukan yang mungkin timbul dapat diantisipasi sejak awal sehingga di masa yang akan datang akan terjadi akselerasi kondisi kependudukan sesuai dengan yang kita inginkan.

Kedua, Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo yang diikuti dengan konferensi internasional terkait lainnya dan penetapan Sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MSGs*) telah mengamanatkan banyak hal bagi Negara-negara yang ikut menandatangani kesepakatan yang dihasilkannya. ICPD tahun 1994 di Kairo secara jelas menyepakati pentingnya mengintegrasikan kependudukan dalam pembangunan.

Kebijakan kependudukan di tingkat daerah seperti halnya Kabupaten Boalemo merupakan implementasi kebijakan kependudukan Nasional. Kebijakan pembangunan dibidang kependudukan telah melahirkan paradigma baru Program Keluarga Berencana Nasional. Paradigma baru tersebut adalah perubahan pada konsep dan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan penurunan fertilitas menjadi lebih kearah pendekatan kesehatan reproduksi yang lebih memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesehatan gender.

Kesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi adalah masalah yang strategis dalam meningkatkan cakupan program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. Kesertaan Keluarga Berencana, terutama dalam praktek Keluarga Berencana serta pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, termasuk pencegahan kematian, hingga saat ini belum memuaskan khususnya bagi masyarakat terpencil. Bagi masyarakat terpencil masalah

Keluarga Berencana banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterisolasian serta keterbatasan masyarakat terpencil. Keterisolasian tersebut wujud kurangnya akses kesehatan, akses pendidikan, akses sosial, akses budaya, komunikasi serta transportasi.

Karena program Keluarga Berencana merupakan suatu program yang tidak serta merta langsung diterima oleh masyarakat terpencil, maka sangat dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap manfaat serta kegunaan dalam mengikuti Keluarga Berencana. Walaupun demikian program ini tetap dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat terpencil sebagai program pemerintah dengan harapan akan terjadi penekanan dalam hal kepadatan penduduk dan kesehatan Ibu dan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu analisis bagaimana pola penerimaan program Keluarga Berencana secara umum di masyarakat khususnya masyarakat terpencil serta faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga program Keluarga Berencana tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat terpencil. Bertolak dari uraian-uraian tersebut, maka yang akan diteliti adalah: Bagaimana dinamika kehidupan masyarakat terpencil dalam menerima program Keluarga berencana dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi komunitas adat terpencil dalam menerima program Keluarga Berencana

Dinamika Kehidupan Masyarakat

Masyarakat atau *society* sering diartikan sebagai kumpulan individu-individu yang ada dalam lingkungan tertentu. Pengertian masyarakat hanya terbatas pada kumpulan individu-individu, sebenarnya sangat keliru dan didasarkan pada pengertian yang sempit, sekumpulan orang yang sedang mengikuti rapat di Balai Kelurahan atau Desa tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat atau *society*. Meskipun mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain, namun tidak ada ikatan lain hanya sekedar menghadiri rapat atau mendengarkan apa yang sedang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Wujud kesatuan kolektif manusia yang mempunyai pengertian yang hampir sama dengan konsep masyarakat, seperti golongan sosial, kategori sosial (*grup*), perkumpulan atau *association* community kerumunan (*crowd*) dan sebagainya. Begitu kompleksnya wujud kesatuan kolektif manusia yang identik dengan masyarakat, sehingga diperlukan suatu rumusan yang jelas dan lengkap mengenai istilah masyarakat. Oleh sebab itu untuk memperoleh perbedaan yang jelas mengenai masyarakat dengan wujud kesatuan kolektif

masyarakat lainnya, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat tentang konsep masyarakat.

Koentjaraningrat (1990) mengemukakan masyarakat adalah kesatuan hidup masyarakat yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan Shadily (dalam, Ahmadi, 1986:34) mengemukakan masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai kebatinan satu sama lain. Selanjutnya Gillin dan Koentjaraningrat (1990) mengemukakan istilah masyarakat atau society sebagai “*the largest grouping in which command customs, traditions, attitudes and feeling of unity are operative*”.

Lebih lanjut Durkheim (dalam, Taneko, 1990) mendefinisikan masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Soekanto (dalam, Santoso, 1983) mengemukakan istilah yang juga identik dengan konsep masyarakat, yaitu *community* yang dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Istilah mana menunjuk pada warga-warga desa, sebuah kota, suku atau suatu bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok tersebut memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat.

Selanjutnya, Polak (1982) mengemukakan masyarakat yaitu wadah segenap antar hubungan sosial, terdiri atas banyak sekali kolektivitas-kolektivitas serta kelompok-kelompok lebih kecil atau sub-kelompok yang tersusun secara hirarkis, sejajar dan setaraf.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dikatakan masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut.

- a. Adanya individu-individu yang hidup berkelompok.
- b. Adanya daerah atau wilayah tertentu.
- c. Adanya hubungan sosial antara anggota-anggota kelompok, dalam jangka waktu yang lama.
- d. Adanya norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat.
- e. Harus mempunyai pemimpin yang mengarahkan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dalam bagian ini peneliti lebih memfokuskan pada masyarakat pedesaan. Ada beberapa macam tipe masyarakat yang dikemukakan para ahli ilmu-ilmu sosial, diantaranya adalah masyarakat

pedesaan. Masyarakat pedesaan tidak identik dengan masyarakat tradisional, atau masyarakat terpencil, juga tidak sama dengan masyarakat tertinggal.

Secara sepintas masyarakat pedesaan hampir identik dengan masyarakat tradisional ataupun masyarakat terpencil. Tetapi dalam kenyataannya membuktikan bahwa masyarakat pedesaan jauh berbeda dengan masyarakat terpencil.

Sehubungan dengan itu, Polak (1966) mengemukakan definisi tentang masyarakat pedesaan sebagai berikut masyarakat pedesaan pada dasarnya terikat pada tanah (*rures*) dalam hubungan ekologis, baik menurut perekonomiannya (mata pencaharian), maupun mentalitas dan gaya kehidupannya

Masyarakat pedesaan umumnya mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka antara dengan warga masyarakat pedesaan lainnya, diluar batas-batas wilayahnya. Sistem penghidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Juga umumnya masyarakat desa mata pencahariannya adalah bertani, walaupun ada juga yang bekerja sebagai tukang kayu, pegawai, pengusaha dan sebagainya, akan tetapi inti pekerjaan lain hanya merupakan pekerjaan sampingan atau sampingan.

Konsep Masyarakat Terpencil

Kajian terhadap masyarakat terpencil tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan lainnya. Akan tetapi ada komponen-komponen yang saling membedakannya seperti kontak sosial dengan masyarakat luas. Secara konseptual masyarakat diartikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Pada dasarnya masyarakat tidak dipandang sebagai penjumlahan dari individu-individu sematan-mata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup oleh karena masyarakat memiliki kodrat untuk hidup bersama, serta merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari anggota-anggotanya. Durkheim memandang masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Menelaah ciri-ciri pokok dari masyarakat meliputi kesatuan hidup, adat istiadat serta identitas bersama, maka masyarakat itu harus memiliki persyaratan seperti (*a*) adanya daerah tertentu atau batas tertentu, (*b*) adanya manusia yang bertempat tinggal dalam jangka waktu lama (*c*) adanya

kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk hubungan kerjasama diantara anggota-anggotanya serta (*d*) terdapatnya norma-norma atau aturan-aturan.

Dari beberapa persyaratan di atas, maka masyarakat dapat dilihat dalam dua aspek yakni aspek struktural dan aspek dinamikanya. Dari aspek struktural masyarakat dilihat sebagai keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok meliputi kaedah-kaedah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan dinamika masyarakat yakni meliputi proses-proses dan perubahan sosial. Proses sosial merupakan cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorang dan kelompok-kelompok manusia itu saling bertemu dengan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan melalui hubungan inilah masyarakat akan mengalami perubahan.

Perubahan dalam masyarakat, pada prinsipnya tetap memperhatikan tata nilai yang berlaku dimasyarakat terutama pada masyarakat pedesaan dan lebih khususnya pada masyarakat terasing (*primitif*). Masyarakat pedesaan adalah kelompok yang hidup melalui dan di dalam suasana cara, pemikiran pedesaan. Biasanya mereka bekerja, berbicara, berpikir dan melakukan kegiatan apapun selalu mendasarkan diri pada apa-apa yang berlaku di daerah pedesaan.

Pola kehidupan masyarakat pada umumnya didasarkan pada rasa kesatuan hidup setempat, hal ini disebabkan oleh karena adanya ikatan tempat hidup dan identitas bersama antara anggota-anggota masyarakatnya, disisi lain karena diikat oleh suatu tradisi dan adat istiadat yang sulit dilepaskan oleh setiap anggota masyarakat. Apabila satu anggota masyarakat atau kelompok melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pola tingkah laku yang lazim dan atau melakukan dihadapan kelompoknya, maka hal demikian itu merupakan sesuatu hal yang dikutuk oleh masyarakat disekelilingnya.

Pada prinsipnya persoalan masyarakat merupakan hal yang sangat kompleks, karena disatu sisi melihat pola-pola maupun kehidupan yang berbeda-beda, selain itu pula setiap pola hidup masyarakat selamanya memiliki persamaan dan perbedaan secara universal. Pola hidup masyarakat yang sangat kompleks ini pula dialami oleh masyarakat terasing, sebab pada umumnya masyarakat terasing lebih banyak menutup diri dengan dunia luar.

Masyarakat terasing merupakan masyarakat masih hidup mengembara atau setengah mengembara atau setengah mengembara, karena mata pencaharian hidup mereka yang pokok adalah meramu sagu, berburu, atau berkebun secara amat sederhana, karena lokasi wilayah tempat tinggal mereka

terpencil, karena dianggap masih berkebudayaan "*primitif*" dan karena pun mereka didatangi oleh orang luar, mereka belum dibina secara mantap.

Walaupun masyarakat terasing ada yang masih mengembara atau dalam istilah antropologi nomaden serta belum menerima pengaruh-pengaruh dari luar, akan tetapi sudah ada sebagian yang membuka diri dengan dunia luar. Penduduk masyarakat yang masih hidup mengembara atau setengah mengembara, dan juga warga yang sudah menetap dan dianggap mempunyai kebudayaan yang masih "*primitif*" dan walaupun sebagian dari mereka telah terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan di luar sehingga masyarakatnya sudah menunjukkan kemajuan.

Aktivitas masyarakat terpencil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, memiliki kesamaan dalam kehidupan masyarakat terpencil yang mendiami lereng-lereng gunung di Provinsi Gorontalo, dimana pola-pola kehidupannya, seperti mereka meramu dan mengumpulkan makanan pada tingkat yang sederhana, berladang berpindah-pindah, yang tidak memiliki tempat tinggal yang menetap.

Peran Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana

Keberhasilan setiap kegiatan maupun tindakan manusia dalam masyarakat mengandung makna bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, akan tetapi setiap pemaknaan tindakan tersebut bagi orang lain tergantung bagaimana dia dapat memahami interaksi berlangsung.

Mead memandang tentang signifikan atau bahasa dalam setiap kelompok masyarakat. Konsep ini dikemukakan untuk membedakan manusia dengan binatang, dimana menurutnya bahwa hanya manusia yang dapat memahami simbol-signifikan. Simbol signifikan adalah suatu makna yang dimengerti bersama, dimana simbol signifikan dapat dikembangkan melalui interaksi. Selanjutnya Mead melukiskan satu keintiman antara dua orang, dimana kedua orang itu mengembangkan suatu bahasa yang hampir bersih pribadi dalam proseas kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, atau sering disebut suatu proses sosial umum.

Kualitas manusia baik aspek jasmaniah maupun rohaniah merupakan prasyarat suksesnya pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Dalam pandangan Seafullah Dj. (2002) bahwa kualitas manusia yang diharapkan sebagai penopang dalam penyelenggaraan pembangunan itu dicirikan oleh tiga hal: "(1) berpendidikan minimal SMA/ sederajat, (2) sehat jasmaniah dan rohaniah, dan (3) mampu memenuhi kebutuhan ekonomi minimal bagi dirinya sendiri, dan bila telah berkeluarga mampu memenuhi ekonomi keluarganya".

Indikator manusia yang berkualitas dimaksud pada prinsipnya berorientasi pada kemampuan setiap individu untuk dapat mewujudkan kemampuan baik dari segi intelektual dan wawasan yang kritis, keterampilan diri, dan kematangan spiritualnya.

Indikator lain yang turut mempengaruhi kualitas manusia adalah pemahaman masyarakat terhadap masalah kependudukan, dalam hal ini Keluarga Berencana. Keluarga Berencana dalam pemahaman masyarakat pada umumnya hanya untuk kaum wanita (istri) semata tanpa melibatkan pria (suami) sebagai mitra dalam suatu keluarga. Kini Keluarga Berencana dengan paradigma baru melibatkan kaum pria (suami) untuk bersama-sama terlibat secara aktif dalam program keluarga berencana. Perubahan paradigma tersebut merupakan hasil konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan (ICPD 1994) yang menyepakati perubahan paradigma program KB Nasional. Perubahan tersebut ialah dari konsep dan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan penurunan fertilitas menjadi lebih ke arah pendekatan kesehatan reproduksi yang lebih memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender. Peran pria (suami) semakin didorong partisipasinya dalam KB.

Sebagaimana diketahui, masih kurangnya partisipasi pria/suami dalam KB dan Kesehatan Reproduksi pada dasarnya disebabkan antara lain oleh ketidakmengertian pria/suami akan pentingnya cara-cara berperan dalam KB dan kesehatan Reproduksi. Hal ini tercermin dari adanya kebiasaan masyarakat yang masih cenderung menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab tersebut kepada istri/perempuan. Selain itu, rendahnya kesertaan pria/suami khususnya dalam KB disebabkan oleh beberapa hal, antara lain alat kontrasepsi yang tersedia lebih banyak diperuntukkan bagi wanita/istri, sedangkan untuk pria/suami tidak banyak tersedia, hanya kondom dan vasektomi. Hal lain juga adalah kurangnya pengetahuan dan informasi para suami/pria tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dapat menyebabkan tidak harmonisnya komunikasi antara suami-isteri.

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa Partisipasi pria (suami) dalam Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Dalam bahan pembelajaran “Peningkatan Partisipasi Pria, dalam KB dan Kesehatan Reproduksi” (BKKBN: 2002) rendahnya partisipasi pria dalam Keluarga Berencana disebabkan oleh dua faktor utama yaitu;

1. Faktor dukungan, baik politis, sosial budaya, maupun keluarga yang masih rendah sebagai akibat randah atau kurangnya pengetahuan penentu kebijakan dan pria atau suami serta lingkungan sosial budaya yang

menganggap KB dan Kesehatan Reproduksi merupakan urusan dan tanggung jawab perempuan.

2. Faktor akses, baik akses informasi maupun akses pelayanan. Dilihat dari akses informasi, materi informasi pria masih sangat terbatas, demikian pula halnya dengan kesempatan pria/suami yang masih kurang dalam mendapatkan informasi mengenai KB dan kesehatan Reproduksi. Keterbatasan juga dilihat dari sisi pelayanan dimana (a) Sarana pelayanan yang dapat mengakomodasikan kebutuhan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pria (suami) masih sangat terbatas, sementara jenis pelayanan kesehatan reproduksi untuk pria (suami) belum tersedia pada semua tempat pelayanan, (b) Metode kontrasepsi untuk suami hanya terbatas pada kondom dan vasektomi.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah *pertama*; di lokasi ini belum pernah dilakukan suatu penelitian terhadap yang berkaitan dengan dengan masalah program Keluarga Berencana. *Kedua*; bahwa kehidupan penduduk desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo makin hari makin berkembang sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman seperti perkembangan informasi dan komunikasi, teknologi, transportasi perkembangan ekonomi, sehingga sangat memungkinkan institusi lama akan berubah dan akan muncul institusi baru.

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan menyeluruh serta mendalam, penulis mengedarkan *kuesioner* (daftar pertanyaan) kepada sampel penelitian (responden). Adapun responden dalam penelitian ini ditetapkan dengan secara sengaja (*purposive sampling*) sebanyak 60 Kepala Keluarga (KK)

Selain responden yang dijadikan untuk menjangkau data dan informasi terhadap masalah penelitian, maka peneliti menetapkan informan penelitian. Penetapan informan diharapkan dapat memberikan data yang akurat terhadap permasalahan penelitian. Adapun informan yang peneliti tetapkan dalam penelitian antara lain Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pimpinan pemuda di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Dalam upaya untuk mengetahui dan mendapatkan informan yang benar-benar dapat memberikan keterangan atau memahami masalah yang akan diteliti, maka sebelumnya peneliti melakukan penjangkauan dengan jalan

melakukan wawancara pendahuluan dengan Kepala Desa Sariپی Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo

Setelah melakukan penjajakan, maka peneliti menentukan responden untuk diedarkan kuesioner dan informan yang diwawancarai. Peneliti memilih responden dan informan ini berdasarkan umur kedudukan dan pengetahuan. *Pertama* dipilih informan yang agar lanjut usia, hal ini penulis maksudkan mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan terhadap masalah dan informasi yang penulis perlukan.

Kedua; penulis pula memilih informan yang masih muda usianya, pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka sudah hidup dalam alam yang serba kompleks dan rumit terutama dalam proses perkembangan zaman dewasa ini. Teknik Pengumpulan Data Untuk menjangkau data primer dan data sekunder, maka dilakukan teknik pengumpulan data melalui observasi, penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden, dan wawancara secara mendalam dan berstruktur kepada sejumlah informan. Untuk memperoleh data primer ini dilakukan melalui melalui tiga cara yaitu:

Pertama, wawancara berstruktur, dimana responden akan memberikan alternatif jawaban secara terbatas dan telah ditentukan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Responden tidak terlalu berkesempatan untuk mengulas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, wawancara berstruktur diarahkan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana persepsi masyarakatnya terhadap program Keluarga Berencana.

Kedua; wawancara bebas, yaitu teknik untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan ide, tanggapan, persepsi dan aspirasi tentang suatu fenomena yang ingin diketahui. Wawancara bebas sifatnya lebih terbuka dan fleksibel, sehingga diharapkan dapat menangkap informasi penting yang berkembang di lapangan dan tidak terduga sebelumnya.

Karena penelitian ini merupakan kajian sosiologis-antropologis, maka diperlukan informan kunci (*key informan*) yang lebih mengetahui secara mendalam mengenai situasi sosial, gejala-gejala sosial adat istiadat serta norma-norma serta nilai-nilai yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi pasif, dimana peneliti tidak melibatkan diri secara penuh atau langsung terhadap kegiatan masyarakat yang menjadi obyek penelitian, tetapi hanya bersifat pasif dan mengamati kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat terutama yang berhubungan dengan proses integrasi masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari.

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah tipe wawancara terbuka dan tak berstruktur. Wawancara terbuka dan tak berstruktur digunakan untuk memahami perilaku kompleks anggota masyarakat tanpa membuat kategorisasi priori (ditentukan sebelumnya) yang dapat membatasi penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Keluarga Berencana pada Komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo akan di lihat melalui hal-hal sebagai berikut: (1) tingkat pendidikan Pasangan Usia Subur (PUS), (2) pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap program Keluarga Berencana (KB), (3) tingkat pendapatan Pasangan Usia Subur (PUS), (4) usia perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS), (5) pandangan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang jumlah anak yang dimiliki, (6) pandangan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang pembatasan jumlah anak dari segi adat dan tradisi setempat, (7) pandangan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang pembatasan jumlah anak dari segi agama yang dianut, (8) usia isteri pada saat perkawinan dan sistem pelayanan petugas Keluarga Berencana setempat.

a) Tingkat Pendidikan Isteri

Masalah pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat terutama diperoleh dalam proses pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, akan berimplikasi pada pandangan masyarakat dalam setiap gerak langkah maupun setiap perubahan dan perkembangan yang berlangsung dalam kehidupannya sehari-hari.

Dari 60 responden pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, diperoleh data yakni 56,67% responden berpendapat bahwa tingkat pendidikan isteri cukup berpengaruh terhadap penerimaan KB dan hanya 6,67% yang menyatakan tidak berpengaruh.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa faktor tingkat pendidikan isteri merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan dalam pelaksanaan program KB pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Bagi Komunitas Adat Terpencil masalah pendidikan menjadi faktor yang selalu menjadi permasalahan. Sebab secara

umum masyarakat terpencil rata-rata memiliki pendidikan lulusan Sekolah Dasar.

Berdasarkan interpretasi data serta hasil wawancara terlihat bahwa masalah pendidikan merupakan salah satu unsur utama dalam program Keluarga Berencana. Ketidakmampuan masyarakat dalam menerima pembinaan misalnya dapat berdampak pada pelaksanaan program keluarga Berencana. Disisi lain para ptugas penyuluh lapangan dalam memberikan pembinaan harus memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

b) Tingkat Pendidikan Suami

Suami pada umumnya sangat berpengaruh dalam setiap pengaturan dalam rumah tangga. Sebab bagi masyarakat Gorontalo pada umumnya khususnya pada daerah-daerah terpencil suami adalah tulang punggung perekonomian keluarga. Pada bagian ini akan dianalisis pengaruh latar belakang tingkat pendidikan suami terhadap penerimaan Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Masalah pendidikan merupakan satu hal yang dapat menunjang penerimaan program Keluarga Berencana, sebab melalui pendidikan manusia dapat mempelajari dan berbagai perkembangan yang berlangsung dalam suatu wilayah atau suatu komnitas. Dilain pihak pendidikan dapat merubah sikap maupun cara manusia dalam hal bertindak dan berpola.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden diperoleh data yakni 63,33% responden berpendapat bahwa tingkat pendidikan suami cukup berpengaruh terhadap penerimaan KB dan hanya 3,33% yang menyatakan tidak berpengaruh. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa faktor tingkat pendidikan suami juga merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. Hal demikian pula terlihat dalam analisi terhadap tingkat pendidikan Istri dalam menerima program Keluarga berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

c) Tingkat Pemahaman Isteri

Tingkat pemahaman isteri tentang program KB terhadap penerimaan Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden diperoleh data bahwa sebagian besar yakni

42 responden atau 70% dari 60 responden mengaku bahwa pemahaman isteri terhadap betapa pentingnya program keluarga Berencana selanjutnya dari 60 responden tidak seorang pun menyatakan bahwa pemahaman isteri dalam terhadap program Keluarga Berencana tidak berpengaruh. Data tersebut menunjukkan bahwa faktor tingkat pemahaman isteri tentang program KB merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan program KB pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

d) Tingkat Pemahaman Suami

. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden diperoleh data bahwa sebagian 34 responden atau 56,67% menyatakan bahwa pemahaman suami sangat penting dan berpengaruh dalam penerimaan Program Keluarga Berencana sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh tidak ada responden yang menyatakan pernyataannya. 23 responden atau 38,33% responden menyatakan bahwa pemahaman suami cukup berpengaruh dalam penerimaan program Keluarga Berencana.

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor tingkat pemahaman suami tentang program Keluarga Berencana juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan program Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Bila dianalisis, antara pemahaman isteri dan suami dalam penerimaan program Keluarga Berencana (KB) terlihat bahwa dari 60 responden ternyata pemahaman isteri sangat berpengaruh dalam penerimaan Program Keluarga Berencana (KB). Hal ini terlihat bahwa secara umum suami atau pria kurang memiliki partisipasi terhadap program berencana.

e) Tingkat Pendapatan Pasangan Usia Subur

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden terhadap tingkat Pendapatan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam penerimaan Keluarga berencana diperoleh data bahwa sebanyak 27 responden atau 45% menyatakan bahwa tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap program Keluarga Berencana. 23 responden atau 38,33% menyatakan tingkat pendapatan cukup berpengaruh dalam program penerimaan Keluarga Berencana (KB), 10 responden atau 16,67% menyatakan tingkat pendapatan masyarakat maupun tingkat ekonomi masyarakat kurang berpengaruh dalam

penerimaan program Keluarga Berencana (KB) dalam masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat terpencil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ekonomi atau pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas masyarakat termasuk dalam hal penerimaan program Keluarga Berencana (KB). Sebab makin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka akan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang demikian sebagaimana yang telah dianalisis Rostow. Rostow (dalam Lauer, 1993) mencirikan masyarakat tradisional dan modern ditinjau dari sudut perkembangan ekonomi.

Menurut Rostow tahapan ekonomi suatu bangsa atau masyarakat dibagi dalam lima tahap yakni: *Pertama*; tahap masyarakat tradisional, *kedua*; tahap peralihan masyarakat, *ketiga*; tahap masyarakat tinggal landas, *keempat*; tahap masyarakat berdiri sendiri dan tahap *kelima*; adalah konsumsi masa tingkat tinggi.

f) Usia Perkawinan

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden diperoleh data 33 responden atau 55% berpendapat bahwa tingkat usia perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS) sangat berpengaruh terhadap penerimaan Keluarga Berencana. Pada komunitas adat terpencil di Desa Sariپی Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. 6 responden atau 10% responden menyatakan cukup berpengaruh dan 16 responden atau 26,67% yang menyatakan kurang berpengaruh Pasangan Usia Subur dalam penerimaan program keluarga Berencana. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa faktor usia perkawinan merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam keberhasilan program Keluarga Berencana pada umumnya khususnya pada komunitas adat terpencil di Desa Sariپی Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Dari hasil data yang diperoleh dari hasil responden dan hasil wawancara pada informal terlihat bahwa keberhasilan program Keluarga Berencana sangat ditentukan oleh adanya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur bagi masyarakat terpencil pada umumnya sudah menjadi permasalahan umum. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil kurang menikmati penerangan listrik, kurang memperoleh informasi dan kehidupan yang serba keterbatasan akses

inihlah, sehingga masyarakat tidak memikirkan bagaimana masa depannya dikemudian hari.

g) Pandangan PUS Tentang Jumlah Anak Yang Dimiliki

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden diperoleh data sebanyak 61,67% responden berpendapat bahwa pandangan isteri tentang jumlah anak yang ideal sangat berpengaruh terhadap penerimaan KB pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan hanya 6,67% yang menyatakan kurang berpengaruh.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa faktor pandangan isteri tentang jumlah anak yang ideal merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan program KB pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Responden atau 58,33% berpendapat bahwa pandangan suami tentang jumlah anak 2 orang yang ideal dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap penerimaan program keluarga Berencana pada umumnya khususnya pada komunitas adat terpencil. 20 responden atau 33,33%. 5 responden atau 8,33% menyatakan pandangan idealnya terhadap dalam rumah tangga tersebut cukup hanya memiliki 2 orang anak. Sedangkan dari 60 orang responden tidak ada seorang pun responden yang menyatakan bahwa pandangan ideal bahwa dalam rumah tangga cukup 2 orang saja tidak mempengaruhi program Keluarga Berencana. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa faktor pandangan suami tentang jumlah anak yang ideal merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan program KB pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

h) Pandangan Pasangan Usia Subur terhadap Pembatasan Jumlah Anak Dari Segi Adat dan Tradisi setempat

Bagi masyarakat Gorontalo secara umum adat istiadat sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya. Masyarakat Gorontalo terutama yang tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh berbagai perkembangan komunikasi misalnya memiliki tradisi yang turun temurun sebagai pedoman hidupnya.

Dari 60 responden sebanyak 32 responden atau 53,33% responden berpendapat bahwa pandangan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang pembatasan jumlah anak dari segi adat/tradisi sangat berpengaruh terhadap penerimaan Keluarga Berencana pada Komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. 25 responden atau 41,67% menyatakan atau berpendapat bahwa pandangan jumlah pembatasan anak

Pasangan Usia Subur Cukup berpengaruh terhadap penerimaan program Keluarga Berencana 3 responden atau 5% menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan dari 60 orang responden tidak ada seorang responden yang menyatakan bahwa pembatasan jumlah anak dalam keluarga Pasangan Usia Subur mempengaruhi program penerimaan Keluarga Berencana.

i) Pandangan Pasangan Usia Subur Terhadap Pembatasan Jumlah Anak Dari Segi Agama yang Dianut

Pandangan PUS tentang pembatasan jumlah anak dari segi agama yang dianut terhadap penerimaan Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden sebanyak 30 responden atau 50% berpendapat bahwa pandangan Pasangan Usia Subur tentang pembatasan jumlah anak dari segi agama yang dianut sangat berpengaruh terhadap penerimaan Keluarga Berencana. Responden yang menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 20 responden atau 33,33%, sedangkan responden yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 10 responden atau 16,67%. Masalah pandangan jumlah pembatasan anak dilihat dari aspek agama secara umum sangat memiliki keterkaitan dengan pandangan agama. Hal yang demikian sangat berkaitan dengan masalah amanah. Bagi masyarakat terpencil pandangan yang demikian masih melekat dan dipertahankan.

Pandangan Pasanga Usia Subur tentang pembatasan Jumlah Anak Dari Segi Agama Yang Dianut Terhadap Penerimaan Keluarga Berencana serta hasil wawancara dengan Kepala Desa Saripi terlihat bahwa masalah agama sangat berpengaruh terhadap pembatasan jumlah anak. Masyarakat memiliki pandangan bahwa masalah anak adalah pemberian dari Allah SWT dan bila Allah SWT telah memberikannya kepada manusia, maka rejeki tersebut tetap akan ada. Sehingga hal yang demikian akan berpengaruh terhadap program keluarga Berencana.

j) Usia Isteri Pada Saat Menikah

Usia isteri pada saat menikah terhadap penerimaan Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden diperoleh data 80% berpendapat bahwa usia isteri pada saat menikah kurang berpengaruh terhadap penerimaan program Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan

Paguyaman Kabupaten Boalemo dan hanya 5% yang menyatakan cukup berpengaruh sedangkan sebagian lain responden yakni 9 responden atau 15% menyatakan bahwa usia perkawinan istri tidak mempengaruhi program Keluarga Berencana.

k) Sistem Pelayanan Petugas KB Setempat

Sistem pelayanan petugas Keluarga Berencana setempat terhadap penerimaan Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Sariپی Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden, maka dapat diperoleh data bahwa sebanyak 31 responden atau 51,67% berpendapat bahwa kunjungan petugas Keluarga Berencana kepada Pasangan Usia Subur sangat berpengaruh terhadap penerimaan Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Sariپی Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. 26 responden atau 43,33% menyatakan kunjungan petugas Keluarga Berencana. 3 responden atau 5% menyatakan kunjungan petugas Keluarga Berencana mempengaruhi penerimaan Program Keluarga Berencana. Kunjungan petugas lapangan Program Keluarga Berencana sangat mempengaruhi jalan program Keluarga Berencana dalam kehidupan masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat terpencil di desa Sariپی.

Dari hasil penuturan beberapa informan terhadap kunjungan petugas Keluarga Berencana terlihat atau dapat disimpulkan bahwa kunjungan petugas Keluarga Berencana sangat berguna maupun bermanfaat dalam penerimaan program Keluarga Berencana. Karena dengan kunjungan tersebut masyarakat terutama Pasangan Usia Subur mendengarkan secara langsung dari petugas terhadap proses serta tata cara bagaimana program keluarga Berencana tersebut untuk menjarangkan tingkat kelahiran serta. kepentingan maupun kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden, yakni 30 responden atau 50% berpendapat bahwa perhatian petugas KB kepada Pasangan Usia Subur sangat berpengaruh terhadap penerimaan Keluarga Berencana pada umumnya, khususnya dalam kehidupan komunitas adat terpencil di Desa Sariپی Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. 26 responden atau 43,33% menyatakan cukup berpengaruh serta 4 responden atau 6,67% yang menyatakan kurang berpengaruh terhadap perhatian petugas dalam hal penerimaan program Keluarga Berencana.

Kadaan tersebut menunjukkan bahwa faktor perhatian petugas Keluarga Berencana kepada Pasangan Usia Subur sangat berpengaruh dalam

keberhasilan program Keluarga Berencana pada umumnya khususnya pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Pada bagian ini dianalisis pengaruh kemudahan memperoleh sarana/alat Keluarga Berencana terhadap penerimaan Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden diperoleh data bahwa sebagian besar atau 56,67% responden berpendapat bahwa kemudahan akses sarana Keluarga Berencana sangat berpengaruh terhadap penerimaan KB pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan hanya 43,33% yang menyatakan kurang berpengaruh. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa faktor akses sarana KB sangat berpengaruh dalam keberhasilan program KB pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 60 responden diperoleh data sebagian 29 responden atau 48,33% responden berpendapat bahwa sikap petugas Keluarga Berencana sangat berpengaruh terhadap penerimaan Keluarga Berencana. Selanjutnya sebanyak 25 responden atau 41,67% menyatakan bahwa sikap petugas Keluarga Berencana cukup berpengaruh dalam penerimaan program Keluarga Berencana. Sedangkan sebanyak 5 responden atau 8,33% dan 1 responden atau 1,67% menyatakan kurang dan tidak memiliki pengaruh terhadap pola tingkah laku maupun sikap petugas Keluarga Berencana di lapangan terhadap program Keluarga Berencana masyarakat umumnya khususnya pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Dari beberapa hasil analisis data tentang penerimaan KB pada Komunitas Adat Terpencil nampak bahwa Faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan KB pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo adalah pandangan isteri tentang jumlah anak yang ideal, pandangan suami tentang jumlah anak yang ideal, faktor adat/tradisi, faktor agama yang dianut, tingkat pemahaman isteri, tingkat pemahaman suami, kunjungan petugas KB kepada PUS, perhatian petugas KB kepada PUS, kemudahan akses sarana KB dan sikap petugas KB.

Sedangkan faktor tingkat pendidikan suami, tingkat pendidikan isteri, tingkat pendapatan PUS dan tingkat usia perkawinan PUS cukup berpengaruh terhadap penerimaan KB pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Kuatnya pengaruh faktor agama

dan budaya terhadap penerimaan KB di daerah terpencil dapat dipahami karena kedua faktor ini sangat melekat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Gorontalo pada umumnya terlebih di daerah terpencil. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan sosialisasi program KB faktor agama dan sosial budaya harus mendapatkan perhatian lebih oleh para penentu kebijakan dan pelaksanaan program KB baik adalah tingkat sosialisasi atau pelaksanaan program secara keseluruhan.

Faktor lainnya yang turut berpengaruh adalah latar belakang pendidikan Pasangan Usia Subur dan tingkat pengetahuan PUS terhadap program KB. Latar belakang pendidikan PUS adalah variabel yang tak dapat diintervensi oleh penanggung jawab program KB namun hal ini dapat diimbangi dengan sosialisasi program KB dengan intensif dan memperhatikan karakteristik masyarakat terpencil terutama lingkungan sosial budaya masyarakat setempat.

Faktor lain yang berpengaruh adalah tingkat pendapatan atau penghasilan keluarga. Variabel inipun tidak dapat diintervensi atau dirubah oleh penanggung jawab program KB, akan tetapi dapat diimbangi dengan peningkatan kemudahan akses perolehan Alkon bagi PUS di daerah terpencil. Peningkatan akses Alkon KB merupakan bagian dari sistem pelayanan KB yang ternyata turut berpengaruh terhadap penerimaan KB di daerah terpencil. Faktor pelayanan KB lainnya yang turut berpengaruh adalah kunjungan petugas KB, sikap dan perhatian yang ditunjukkan oleh petugas Keluarga Berencana terhadap Pasangan Usia Subur yang ada.

Dengan demikian peningkatan pelayanan sistem KB adalah peningkatan intensitas kunjungan petugas KB, penataan sikap petugas KB, peningkatan perhatian dan kepedulian petugas KB terhadap PUS, dan penyediaan sarana KB dengan biaya yang murah dan mudah terjangkau oleh PUS.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Komunitas Adat Terpencil merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal disuatu wilayah maupun lokasi dan memiliki berbagai keterbatasan informasi, komunikasi, pendidikan, ekonomi sosial dan politik;
2. Program Keluarga Berencana merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk menjarangkan penduduk serta untuk menciptakan

kesehatan antara ibu dan anak terutama bagi masyarakat yang memiliki usia produktif.

3. Prosentase jumlah akseptor Keluarga Berencana terhadap Pasangan Usia Subur pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo mencapai 76,67%. responden
4. Sebanyak 23,33% Pasangan Usia Subur pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo belum menjadi akseptor Keluarga Berencana, ini berarti penerimaan Keluarga Berencana di daerah ini masih perlu ditingkatkan;
5. Dari 60 responden serta berbagai penuturan dari beberapa informan sebagian besar responden dan informan menyatakan dan menuturkan bahwa faktor agama dan sosial budaya sangat berpengaruh pada penerimaan Keluarga Berencana di daerah terpencil Kabupaten Boalemo;
6. Faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh adalah latar belakang pendidikan Pasangan Usia Subur, tingkat pemahaman Pasangan Usia Subur terhadap program Keluarga Berencana.
7. Hasil analisis data yang penulis lakukan ternyata sebagian besar responden memandang bahwa tingkat pendapatan/penghasilan keluarga, usia perkawinan, pandangan Pasangan Usia Subur tentang jumlah anak yang ideal serta sistem pelayanan petugas Keluarga Berencana terhadap sosialisasi program Keluarga Berencana dalam masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan program Keluarga Berencana di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Saran

Dalam upaya peningkatan Penerimaan Keluarga Berencana pada komunitas adat terpencil di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, direkomendasikan kepada pemerintah khususnya kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo dan BKKBN Kabupaten Boalemo mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem sosialisasi program Keluarga Berencana yang menekankan pendekatan budaya yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat;
2. Para petugas penyuluh lapangan Keluarga Berencana diharapkan dapat memahami karakteristik masyarakat terutama di daerah terpencil, hal ini dimaksudkan agar materi penyuluhan benar-benar dapat diterima oleh masyarakat setempat;
3. Meningkatkan sistem pelayanan Keluarga Berencana dengan cara penyediaan Alkon dengan biaya yang murah dan mudah terjangkau oleh

- masyarakat terpencil, peningkatan kunjungan dan perhatian/kepedulian petugas Keluarga Berencana dan penataan sikap petugas Keluarga Berencana agar lebih diterima dalam lingkungan masyarakat setempat;
4. Dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi perlu melibatkan para pelaku pendidikan, tokoh agama dan tokoh adat dan dikondisikan agar dapat berkolaborasi dengan para petugas program KB dan kesehatan dalam bentuk team terpadu.

Daftar Pustaka

- Awan Mutakin Dkk, 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*. PT.Genesindo. Bandung.
- Djaja Saefullah, 2002. *Paradigma Administrasi*. Pidato Dies Natalis Universitas Parahiyangan. Bandung. LEMLIT Universitas Padjadjaran Bandung.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil., 2003. *Pedoman Standarisasi Bimbingan dan Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Depsos RI, Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil., 2003. *Laporan Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil*. Depsos RI
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil., 2003. *Model Perlindungan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Depsos RI
- Husin Iskandar, 2003. *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*. Direktorat Pemberdayaan KAT Departemen Sosial RI, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara. Bandung.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiri Syarif, 2002. *Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi*. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Jakarta.
- Sajogyo Pudjiwati, 1983. *Penelitian Integrasi Wanita Pedesaan Dalam Proses Pembangunan di Jawa Barat*. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sistem Informasi Komunikasi Adat Terpencil*. 2003. Direktorat Pebredyaan KAT Ditjen Sosial Depatemen Sosial, Jakarta.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Buku Panduan Peningkatan Partisipasi pria (dalam Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi). Jakarta, 2004.

Badan Perencana Pembangunan Daerah. 2003. Indikator Sosial Budaya Provinsi Gorontalo.